



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**RAPAT KOMISI IX DPR RI**

**(Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan))**

- 
- Tahun Sidang : 2019-2020  
Masa Persidangan : I  
Rapat ke : 18  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum  
Dengan : 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI;  
2. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI;  
3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI;  
4. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);  
5. Ketua Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GP. Farmasi);  
6. Direktur Eksekutif *International Pharmaceutical Manufacturer Group* (IPMG);  
7. Ketua Gabungan Perusahaan Alat Kesehatan dan Laboratorium (GAKESLAB).  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/tanggal : Rabu, 27 November 2019  
Pukul : 10.00 WIB – selesai  
Acara : 1. Evaluasi Tata Kelola Obat dan Alat Kesehatan untuk Program JKN Tahun 2018-2019;  
2. Penyelenggaraan Tata Kelola Obat dan Alat Kesehatan bagi Peserta BPJS Kesehatan Tahun 2020-2021;  
3. Masukan dari Penyedia Obat dan Alat Kesehatan guna Perbaikan Sistem Tata Kelola Obat dan Alat Kesehatan untuk Program JKN.  
Ketua Rapat : 1. Rapat dibuka oleh Ibu Felly Estelita Runtuwene, SE/Ketua Komisi IX DPR RI  
2. Rapat dilanjutkan dan ditutup oleh Bapak H. Ansory Siregar, Lc/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.

- Sekretaris Rapat : Yanto Supriyanto/ Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
- Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Lantai I  
Gedung Nusantara I  
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
- Hadir : A. 33 orang dari 51 orang Anggota Komisi IX DPR RI;  
B. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI, drg. Oscar Primadi, MPH, beserta jajaran;  
C. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Dra. Engko Sosialine Magdalene, Apt, M.Bio Med, beserta jajaran;  
D. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, dr. Bambang Wibowo Sp. OG (K), MARS, beserta jajaran;  
E. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), DR. Ir. Roni Dwi Susanto, M.Si, beserta jajaran;  
F. Ketua Umum Gabungan Perusahaan Alat Kesehatan dan Laboratorium (GAKESLAB), Drs. Sugihadi H.W, MM, beserta jajaran;  
G. Direktur Eksekutif *International Pharmaceutical Manufacturer Group* (IPMG), Parulian Simanjuntak, beserta jajaran;  
H. Direktur Eksekutif Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GP. FARMASI), Darodjatun Sanusi, beserta jajaran.

## I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI, Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Ketua Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GP. Farmasi), Ketua *International Pharmaceutical Manufacturer Group* (IPMG), Ketua Gabungan Perusahaan Alat Kesehatan dan Laboratorium (GAKESLAB) dibuka pukul 10.30 WIB, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 251 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat telah memenuhi kuorum dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI bersama LKPP mengambil langkah-langkah strategis dalam jangka pendek untuk memenuhi ketersediaan Obat Program, obat dan alat kesehatan yang digunakan untuk program JKN, diantaranya sebagai berikut:

- a. Solusi kebijakan untuk pelaksanaan pengadaan obat JKN dan alat kesehatan untuk tahun 2020-2021. Jika hal ini belum bisa dilaksanakan sebelum 31 Desember 2019, maka harus ada perpanjangan bagi penyedia obat dan alat kesehatan 3 bulan.
  - b. Langkah solutif sesuai Pasal 61 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang memberi ruang kepada pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan mengambil langkah penyelesaian.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan RI, Kementerian Perindustrian RI dan Kementerian Perdagangan RI untuk secara serius mengambil kebijakan guna menurunkan harga obat dan alat kesehatan.
  3. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan RI mendesak BPJS Kesehatan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan RI untuk membayar utang yang jatuh tempo, sehingga pelayanan kesehatan bagi peserta JKN dapat berjalan lancar.
  4. Komisi IX DPR RI meminta GP Farmasi Indonesia, IPMG dan Gakeslab untuk dapat terus berpartisipasi mendukung Pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan daya saing dan mutu produk.
  5. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI agar pemanfaatan alat kesehatan dalam negeri di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah sebesar 20% di tahun 2020.
  6. Komisi IX DPR RI akan membentuk Panitia Kerja (Panja) terkait tata kelola obat.
  7. Komisi IX DPR RI akan membentuk Panitia Kerja (Panja) terkait tata kelola alat kesehatan.

### **III. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 19.30 WIB.

Jakarta, 27 November 2019

KETUA RAPAT/  
WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI,

Ttd.

H. ANSORY SIREGAR, LC  
A-414